

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan berdampak sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi daerah, peran kotamadya adalah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah ini seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya (Muqorrobin & Soejoto, 2017).

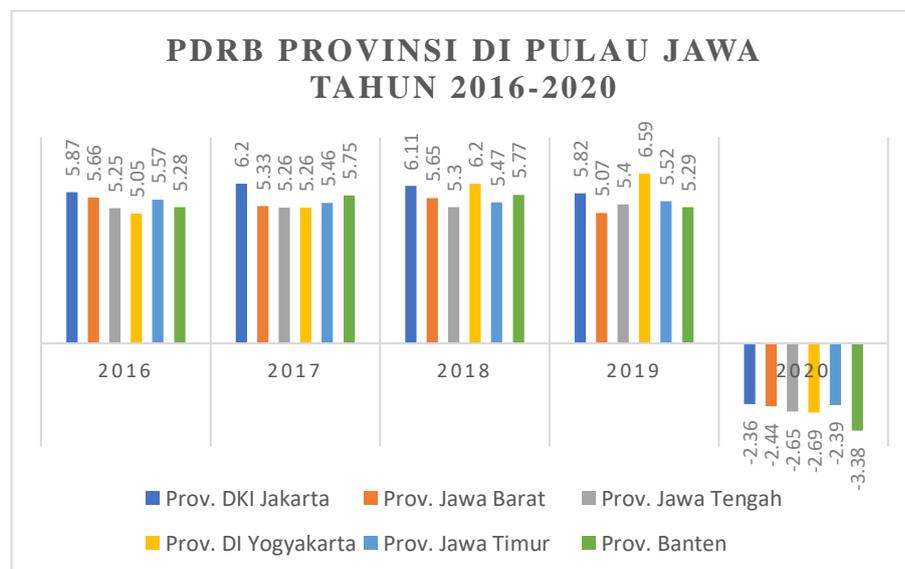
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengatur kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya. Hak dan wewenang ini memungkinkan pemerintah daerah untuk secara bebas menggunakan kekayaan daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kondisi perekonomian yang baik dan meningkat dapat ditentukan sebagai indikator berhasilnya pembangunan ekonomi di kehidupan masyarakat. Salah satu kriteria penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang nyata terhadap suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan (Siregar, 2021). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan nilai dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam selang waktu tertentu berdasarkan beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah lapangan kerja lebih besar daripada jumlah pengangguran, dan serta menurunnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi

dapat dipahami sebagai proses perubahan yang terus menerus menuju kondisi ekonomi yang lebih baik bagi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan PDRB daerah (Heidy Menajang, 2019). PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dihitung sebagai PDRB atas dasar harga konstan.

**Gambar 1.1 PDRB Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Persen)**



Sumber : BPS 2021 (data diolah)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB seluruh Provinsi yang berada di pulau Jawa di tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Ditahun 2016 Provinsi Jawa Barat diangka 5,66%. Ditahun 2017 Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke empat dengan PDRB sebesar 5,33%. Selanjutnya ditahun 2018 Jawa Barat tetap berada di urutan ke empat dengan PDRB sebesar 5,65%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 5,07% dan berada di posisi ke enam. Tahun 2020 semua

Provinsi di Pulau Jawa mengalami kontraksi pada pertumbuhan ekonominya dan ke enam provinsi ini masuk ke dalam 10 Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta mengalami kontraksi 2,36%, sedangkan Provinsi Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar 2,44%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya *pandemic Covid-19* yang mulai menyebar luas di seluruh Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Dari Fenomena di atas maka Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke empat laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tidak lepas dari pengaruh kabupaten dan kotanya. Menurut BPS Jawa Barat pada tahun 2020, Kabupaten Bekasi merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Bekasi sebesar Rp 17,94 triliun. Kota Bandung berada di posisi kedua dengan PDRB sebesar Rp 83,62 triliun. Lalu di posisi ke tiga ada Kabupaten Bogor dengan PDRB sebesar 236,15 triliun.

Hal ini tidak sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang berada di Jawa Barat. Berdasarkan data BPS per Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat di urutan kedua terbanyak nasional. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut data BPS per Maret tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,4% atau sekitar 4.2 juta jiwa, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan per Maret tahun 2020 yang mencapai 7,88% atau sekitar 3,9 juta jiwa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar untuk kehidupan yang baik. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang diperlukan oleh seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setara dengan

2.100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non pangan meliputi perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, perjalanan, dan barang-barang lainnya serta jasa (Bank, 2000).

Untuk Mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pemerintah dituntut untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pendapatan daerah kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengetasan kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan dengan biaya ekonomi tinggi, penetapan peraturan daerah tentang pendapatan yang mempengaruhi likuiditas pendidikan, perdagangan barang dan jasa antar daerah, dan Tindakan yang menghambat aktivitas ekspor dan imporr (UU No. 33 Tahun 2004).

**Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021 (data diolah)

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa PAD di Provinsi Jawa Barat pada lima tahun terakhir tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai PAD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 16,180,205,531.87 dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 nilai PAD sebesar Rp 25,223,220,670.29. Hal ini disebabkan karena adanya 4 jenis pemasukan yaitu seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah hingga pendapatan sah lain-lainnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.

**Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021 (data diolah)

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa DAU Provinsi Jawa Barat di lima tahun terakhir dari 2016-2020 mengalami peningkatan. Di tahun 2016 DAU Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1,247,045,751 kemudian meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 DAU Provinsi Jawa Barat menyentuh angka Rp 3,306,552,702. Hal ini terjadi karena dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah di Provinsi Jawa Barat untuk mendanai kebutuhan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dihimpun dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dan menyediakan untuk kegiatan khusus yang menjadi perhatian daerah dan selaras dengan prioritas nasional.

**Gambar 1.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021 (data diolah)

Dapat dilihat pada gambar 1.4 DAK pada Provinsi Jawa Barat di lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2016 DAK Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 7,747,404,320 kemudian di tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai pada tahun 2020 DAK Provinsi Jawa Barat diangka Rp 11,417,942,116. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas tingkat nasional.

Dari fenomena diatas, peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PAD juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun sebelumnya. Peningkatan PAD juga dapat mendorong kegiatan di sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi,,seperti sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketika PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, DAU dan DAK dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena DAU dan DAK biasanya

melebihi kontribusi PAD. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan dan mengelola PAD, DAU, dan DAK yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, dan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran ini harus digunakan untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ahmad, 2019) didapat hasil analisis bahwa, PAD memiliki korelasi yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2017. Besarnya nilai PAD akan diikuti dengan meningkatnya Pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsis Sumatera Selatan Tahun 2012-2018. Diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan (Agus Heriyanto, 2020). Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Agus Heriyanto karena lokasi penelitiannya yang berbeda.

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memilih lokasi di Provinsi Jawa Barat dikarenakan Jawa Barat

termasuk di dalam 10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi terendah tahun 2020 (Sumber: BPS Februari 2021), dan juga disertai dengan jumlah penduduk miskin yang relatif lebih tinggi dari provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 3,92 juta jiwa atau 7,88% dari total populasinya pada tahun 2020. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jawa Barat yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maka Peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Barat.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah ada pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah ada pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah ada pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?

6. Apakah ada pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?
7. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dana alokasi khusus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
6. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat
7. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemiskinan, ruang lingkup penelitian ini ditentukan dengan menggunakan variabel independent antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus variabel intervening adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel dependen adalah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 11 Tahun (2010-2020).

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pengaruhnya terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan menurunkan tingkat kemiskinan di masa yang akan datang.

### 3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi bagi penelitian berikutnya.